

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2024

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Sungai Penuh, 7 Mei 2025

Kepala Kantor

Purnomo

1985071220051011002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	18
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Piutang Bukan Pajak	
C.3 Persediaan	
C.4 Tanah	
C.5 Peralatan dan Mesin	
C.6 Gedung dan Bangunan	
C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.8 Aset Tak Berwujud	
C.9 Aset Lain-lain	
C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.11 Utang kepada Pihak Ketiga	
C.12 Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.13 Pendapatan Diterima Dimuka	
C.14 Uang Muka dari KPPN	
C.15 Ekuitas	
C.16 Catatan Penting Lainnya neraca	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	24
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	
D.6 Beban Perjalanan Dinas	
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.9 Pos Luar Biasa	
D.10 Rincian Beban Khusus penanganan pandemi Covid 19	
D.11 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LO	
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5 Transaksi Antar Entitas	
E.6 Ekuitas Akhir	
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	31
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sungai Penuh, 7 Mei 2025

Kepala Kantor



Purnomo

NIP. 1985071220051011002

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.436.769.900 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.436.769.900 atau mencapai 231,61 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.347.400.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.912.289.801 atau mencapai 98,51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.062.360.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.437.207.521 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp513.421.282; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.923.786.239 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp119.000.000 dan Rp5.318.207.521

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.317.950.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp9.094.391.056 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-3.776.441.056, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.269.900 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-3.774.171.156

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp2.431.033.926, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-3.774.171.156 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 6.661.344.751 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.318.207.521

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2.347.400.000	5.436.769.900	231,61	4.922.000.500
JUMLAH PENDAPATAN		2.347.400.000	5.436.769.900	231,61	4.922.000.500
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.242.327.000	2.241.548.521	99,97	1.908.046.306
Belanja Barang	B.2.2	5.147.457.000	5.002.887.280	97,19	3.486.078.807
Belanja Modal	B.2.3	2.672.576.000	2.667.854.000	99,82	518.540.000
JUMLAH BELANJA		10.062.360.000	9.912.289.801	98,51	5.912.665.113

Sungai Penuh, 7 Mei 2025
Kepala Kantor



Purnomo
1985071220051011002

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Persediaan	C.3	513.421.282	804.550.221
Jumlah Aset Lancar		513.421.282	804.550.221
ASET TETAP			
Tanah	C.4	50.000.000	50.000.000
Peralatan dan Mesin	C.5	8.943.835.428	5.329.998.258
Gedung dan Bangunan	C.6	859.681.300	859.681.300
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(4.960.339.498)	(4.610.745.853)
Jumlah Aset Tetap		4.923.786.239	1.628.933.705
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	22.456.945	22.456.945
Aset Lain-lain	C.9	426.726.830	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(449.183.775)	(22.456.945)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		5.437.207.521	2.433.483.926
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.12	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.13	119.000.000	2.450.000
Uang Muka dari KPPN	C.14	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		119.000.000	2.450.000
JUMLAH KEWAJIBAN		119.000.000	2.450.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.15	5.318.207.521	2.431.033.926
JUMLAH EKUITAS		5.318.207.521	2.431.033.926
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.437.207.521	2.433.483.926

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	5.317.950.000	4.946.700.000
Jumlah Pendapatan		5.317.950.000	4.946.700.000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.241.548.521	1.908.046.306
Beban Persediaan	D.3	1.350.992.889	1.118.739.046
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.311.348.259	1.628.846.502
Beban Pemeliharaan	D.5	257.852.941	419.772.543
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.185.753.471	1.218.703.404
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	746.894.975	332.552.940
Jumlah Beban		9.094.391.056	6.626.660.741
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.776.441.056)	(1.679.960.741)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	2.269.900	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		2.269.900	500.500
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(3.774.171.156)	(1.679.460.241)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNBPN	D.9	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(3.774.171.156)	(1.679.460.241)



Sungai Penuh, 7 Mei 2025
Kepala Kantor

Purnomo
1985071220051011002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	2.431.033.926	1.830.696.804
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(3.774.171.156)	(1.679.460.241)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.4	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	E.4	-	-
EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	6.661.344.751	2.279.797.363
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.887.173.595	600.337.122
EKUITAS AKHIR	E.6	5.318.207.521	2.431.033.926



Sungai Penuh, 7 Mei 2025
Kepala Kantor

Purnomo
1985071220051011002

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 Hal: Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat Covid-19;
11. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 Hal: Pemuktahiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
13. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 Hal: Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemuktahiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-KU.01.01-206 tanggal 3 Agustus 2020 Hal: Tindak Lanjut Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK.KU.01.01-81 Hal Pemuktahiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang semula dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, wilayah Provinsi Jambi yang semula merupakan bagian dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan dan Jambi. Pada tahun 1984 dibentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jambi dengan status Tipe B yang difungsikan mulai tahun 1985 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-04-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jambi, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- Undangan RI Nomor M.12.PR.07.10 tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang perubahan Nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI.

Selanjutnya berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI Nomor A.PR.08.10-36 tanggal 4 September 2000 tentang perubahan Nama Departemen Hukum dan Perundang-Undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan sendirinya Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis menyesuaikan. Sejalan dengan Perkembangan Ketatanegaraan maka terjadi pengembangan Organisasi dan perubahan nomenklatur menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI yang terakhir telah dirubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi terdiri dari 4 (empat) divisi yaitu Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

VISI

"MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM"

MISI

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.347.400.000	2.347.400.000
Jumlah Pendapatan	2.347.400.000	2.347.400.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.242.327.000	2.242.327.000
Belanja Barang	5.147.457.000	5.147.457.000
Belanja Modal	2.672.576.000	2.672.576.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	10.062.360.000	10.062.360.000

Realisasi Pendapatan
Rp5.436.769.900

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.436.769.900 atau mencapai 231,61 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.347.400.000. Pendapatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.436.769.900. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak tahun 2024 dikarenakan banyaknya permohonan pembuatan paspor elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.347.400.000	5.436.769.900	231,61
Jumlah	2.347.400.000	5.436.769.900	231,61

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 10,46 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.436.769.900	4.922.000.500	10,46
Jumlah	5.436.769.900	4.922.000.500	10,46

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp5.436.769.900

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp5.436.769.900 dan Rp4.922.000.500. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,46 dari TA 2023 pendapatan paspor dan pelayanan keimigrasian tahun 2023 meningkat drastis dari tahun sebelumnya karena ada perubahan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun yang sebelumnya 5 tahun. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	5.436.769.900	4.922.000.500	10,46
Jumlah	5.436.769.900	4.922.000.500	10,46

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Visa	-	-	-
Pendapatan Paspor	5.001.150.000	4.160.500.000	20,21
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	78.750.000	118.500.000	(33,54)
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	354.600.000	642.500.000	(44,81)
Jumlah	5.436.769.900	4.922.000.500	10,46

Realisasi Belanja
Rp9.912.289.801

B.2 Belanja

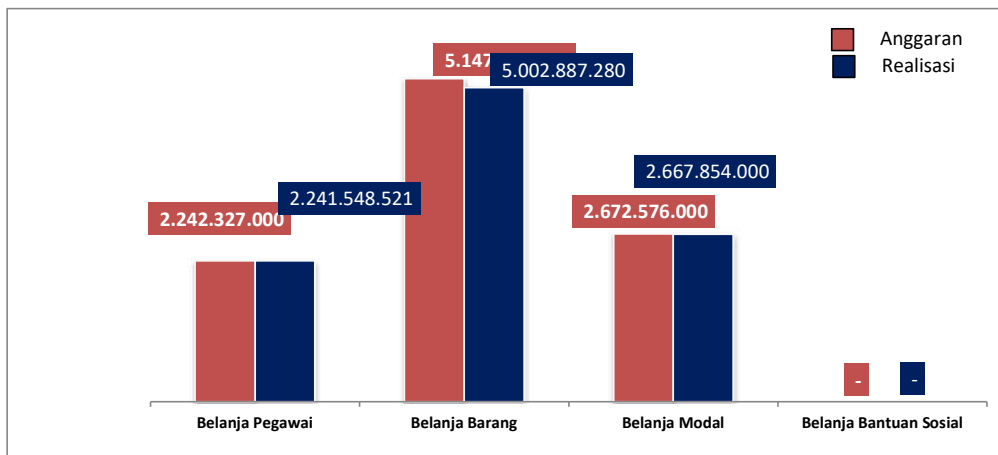
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp9.912.289.801 atau 98,51 % dari anggaran belanja sebesar Rp.10.062.360.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2.242.327.000	2.241.548.521	99,97
Belanja Barang	5.147.457.000	5.002.887.280	97,19
Belanja Modal	2.672.576.000	2.667.854.000	99,82
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	10.062.360.000	9.912.289.801	98,51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 67,65% Terjadi Kenaikan realisasi belanja pegawai dikarenakan penambahan pegawai dan kenaikan pangkat serta gaji berkala beberapa pegawai dan meningkatnya anggaran belanja barang serta belanja modal pada tahun

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	2.241.548.521	1.908.046.306	17,48
Belanja Barang	5.002.887.280	3.486.078.807	43,51
Belanja Modal	2.667.854.000	518.540.000	414,49
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	9.912.289.801	5.912.665.113	67,65

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.241.548.521 dan Rp1.908.046.306. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,48 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan mengalami Penurunan karena adanya mutasi pegawai pada akhir tahun 2022

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.550.036.440	1.308.407.600	18,47
Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.847	24.082	7,33
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	122.300.380	108.727.540	12,48
Belanja Tunj. Anak PNS	42.912.368	36.217.824	18,48
Belanja Tunj. Struktural PNS	59.980.000	43.330.000	38,43
Belanja Tunj. Fungsional PNS	96.580.000	95.980.000	0,63
Belanja Tunj. PPh PNS	9.364.111	820.100	1.041,83
Belanja Tunj. Beras PNS	104.212.380	97.622.160	6,75
Belanja Uang Makan PNS	166.909.000	168.301.000	(0,83)
Belanja Tunjangan Umum PNS	24.280.000	30.940.000	(21,53)
Belanja Uang Lembur	65.439.000	17.676.000	270,21
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	2.242.039.526	1.908.046.306	17,50
Pengembalian Belanja Pegawai	491.005	-	-
Jumlah Belanja	2.241.548.521	1.908.046.306	17,48

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.002.887.280 dan Rp3.486.078.807. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 43,51% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh mengalami kenaikan pada belanja perjalanan dalam negeri dikarenakan naiknya pagu anggaran belanja pada tahun 2023

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	709.935.718	586.548.776	21,04
Belanja Barang Non Operasional	1.342.669.309	876.802.461	53,13
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	196.775.900	190.966.508	3,04
Belanja Jasa	254.243.232	165.495.265	53,63
Belanja Pemeliharaan	313.509.650	447.562.393	(29,95)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.185.753.471	1.218.703.404	79,35
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.002.887.280	3.486.078.807	43,51
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	5.002.887.280	3.486.078.807	43,51

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Rp2.667.854.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.667.854.000 dan Rp518.540.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 414,49% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh tahun 2023 hanya ada belanja modal peralatan mesin untuk alat-alat kantor.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.667.854.000	518.540.000	414,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.667.854.000	518.540.000	414,49
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.667.854.000	518.540.000	414,49

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp2.667.854.000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.667.854.000 dan Rp518.540.000, mengalami kenaikan sebesar 414,49 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh mengalami kenaikan pada tahun 2023 namun tidak signifikan karena hanya belanja alat alat perkantoran

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.667.854.000	518.540.000	414,49
Jumlah Belanja Kotor	2.667.854.000	518.540.000	414,49
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.667.854.000	518.540.000	414,49

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Rekening	50.000.000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	50.000.000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp513.421.282 dan Rp804.550.221. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	513.421.282	804.550.221
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	513.421.282	804.550.221

Persediaan tersebut di atas dalam Rincian persediaan pada Laporan Persediaan satuan kerja Kantor imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci per 31 Desember 2024 terdiri dari barang konsumsi dan bahan pemeliharaan, dengan kondisi baik. Nilai persediaan tahun berjalan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya namun tidak terlalu signifikan yaitu karena naiknya realisasi belanja barang persediaan dan beban persediaan konsumsi pada periode tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp50.000.000 dan Rp50.000.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	50.000.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	50.000.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2451 m2	Jl. Lintas Sungai Penuh Bangko	50.000.000
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
Jumlah			50.000.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp8.943.835.428 dan Rp5.329.998.258. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	5.329.998.258
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.667.853.866
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	9.375.722.094
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(4.839.984.116)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.535.737.978

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Pembelian Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan Tranfer Masuk Berupa BMN dari Direktorat Jenderal Imigrasi

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp859.681.300 dan Rp859.681.300. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	859.681.300
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2024	859.681.300
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(120.355.382)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	739.325.918

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp4.960.339.498 dan Rp4.610.745.853. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.943.835.428	(4.839.984.116)	4.103.851.312
2	Gedung dan Bangunan	859.681.300	(120.355.382)	739.325.918
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	30.609.009	-	30.609.009
Akumulasi Penyusutan		9.834.125.737	(4.960.339.498)	4.873.786.239

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp22.456.945

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp22.456.945 dan Rp22.456.945. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	22.456.945
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	22.456.945
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(22.456.945)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Lain-lain
Rp426.726.830

C.9 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp426.726.830 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	(426.726.830)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	(426.726.830)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-

Mutasi Kurang

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp449.183.775 dan Rp22.456.945. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	22.456.945	(22.456.945)	-
Aset Lain-lain	426.726.830	(426.726.830)	-
-	-	-	-
Total	449.183.775	(449.183.775)	-

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang belum di SP2D

C.12 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Kwitansi UP bulan Juni yang belum di ajukan SPM

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp119.000.000

C.13 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp119.000.000 dan Rp2.450.000. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang Persediaan yang ada direkening, Brankas dan Kwitansi yang belum di SPJ

Ekuitas
Rp5.318.207.521

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.318.207.521. dan Rp2.431.033.926. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 16 Catatan Penting Lainnya neraca

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp5.317.950.000

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.317.950.000 dan Rp4.946.700.000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,51. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak ini berasal dari Pendapatan sewa, pendapatan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan belangan keimigrasian. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Paspor	4.884.600.000	4.185.700.000,00	16,70
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk	78.750.000	118.500.000,00	(33,54)
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	354.600.000	642.500.000,00	(44,81)
	-	-	-
Jumlah	5.317.950.000,00	4.946.700.000,00	7,51

Beban Pegawai
Rp2.241.548.521

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.241.548.521 dan Rp1.908.046.306.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 17,48 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Karena adanya penambahan pegawai pada tahun 2024 dan kenaikan pangkat serta kenaikan gaji berkala beberapa pegawai. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.550.036.440	1.308.407.600	18,47
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.842	24.082	3,16
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	122.300.380	108.727.540	12,48
Beban Tunj. Anak PNS	42.912.368	36.217.824	18,48
Beban Tunj. Struktural PNS	59.490.000	43.330.000	37,30
Beban Tunj. Fungsional PNS	96.580.000	95.980.000	0,63
Beban Tunj. PPh PNS	9.364.111	820.100	1.041,83
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	2.241.548.521	1.908.046.306	17,48

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.350.992.889 dan Rp1.118.739.046

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 20,76 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan beban persediaan disebabkan karena banyaknya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi (paspor). Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	1.350.992.889	1.118.739.046	20,76
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1.350.992.889,00	1.118.739.046	20,76

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.311.348.259 dan Rp1.628.846.502.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 41,90 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Adanya Akun Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel di karenakan Harga Satuan Belanja Airpurifier dibawah nilai kapitalisasi sehingga tercatat sebagai Ekstrakomptabel sedangkan akun yang digunakan adalah akun intrakomptabel. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	593.458.818	455.492.476	30,29
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.220.000	650.000	241,54
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	146.000	493.000	(70,39)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37.464.000	90.960.000	(58,81)
Beban Barang Operasional Lainnya	76.646.900	38.953.300	96,77
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	204.760.600	183.459.750	11,61
Beban Honor Output Kegiatan	50.086.000	55.170.000	(9,22)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.087.822.709	638.172.711	70,46
Beban Langganan Listrik	53.618.165	53.358.736	0,49
Beban Langganan Telepon	1.216.667	1.480.129	(17,80)
Beban Langganan Air	9.450.800	8.543.400	10,62
Beban Sewa	175.257.600	88.113.000	98,90
Beban Jasa Profesi	7.200.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	7.500.000	14.000.000	(46,43)
Jumlah	2.311.348.259	1.628.846.502,00	41,90

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp257.852.941 dan Rp419.772.543.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 38,57 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh beban pemeliharaan mengalami penurunan pada tahun 2023 pada beban pemeliharaan gedung bangunan dan peralatan dan mesin yang masih dalam kondisi baik Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73.660.851	214.824.323	(65,71)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181.489.590	204.632.220	(11,31)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.702.500	316.000	755,22
Jumlah	257.852.941	419.772.543	(38,57)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.185.753.471 dan Rp1.218.703.404

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 79,35 persen disebabkan oleh disebabkan karena meningkatnya jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan naiknya anggaran perjalanan dinas tahun 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	2.107.893.471	1.159.903.404	81,73
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.350.000	36.300.000	(74,24)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.010.000	19.500.000	207,74
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.500.000	3.000.000	183,33
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	2.185.753.471,00	1.218.703.404	79,35

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp746.894.975

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp746.894.975 dan Rp332.552.940.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	682.541.620	315.359.314	116,43
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.193.626	17.193.626	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig	47.159.729	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	746.894.975	332.552.940	124,59
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	746.894.975	332.552.940	124,59

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp2.269.900

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.269.900 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.269.900	-	-
Jumlah	2.269.900,00	-	-

D.9 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNBPN	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.10 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Tidak ada belanja Covid di tahun 2023

D.11 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.2.431.033.926,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.431.033.926,00 dan Rp.1.830.696.804,00

*Defisit LO
Rp.3.774.171.156,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.3.774.171.156,00 dan Rp.1.679.460.241,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini hasil nilai penyusutan transaksional untuk pencatatan nilai aset bertambah pada modul aset

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp6.661.344.751

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.6.661.344.751 dan Rp.2.279.797.363. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.912.289.801
Diterima dari Entitas Lain	(5.436.769.900)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	2.185.824.850
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	6.661.344.751

Ekuitas Akhir
Rp5.318.207.521

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.318.207.521,00 dan Rp.2.431.033.926,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (418935) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,317,950,000	4,946,700,000	371,250,000	7.505
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,317,950,000	4,946,700,000	371,250,000	7.505
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,317,950,000	4,946,700,000	371,250,000	7.505
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,241,548,521	1,908,046,306	333,502,215	17.479
Beban Persediaan	1,350,992,889	1,118,739,046	232,253,843	20.76
Beban Barang dan Jasa	2,311,348,259	1,628,846,502	682,501,757	41.901
Beban Pemeliharaan	257,852,941	419,772,543	(161,919,602)	(38.573)
Beban Perjalanan Dinas	2,185,753,471	1,218,703,404	967,050,067	79.351
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (418935) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	746,894,975	332,552,940	414,342,035	124.594
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,094,391,056	6,626,660,741	2,467,730,315	37.239
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,776,441,056)	(1,679,960,741)	(2,096,480,315)	124.793
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	500,500	(500,500)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	500,500	(500,500)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,269,900	0	2,269,900	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,269,900	0	2,269,900	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,269,900	500,500	1,769,400	353.526
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,774,171,156)	(1,679,460,241)	(2,094,710,915)	124.725
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,774,171,156)	(1,679,460,241)	(2,094,710,915)	124.725

Keterangan :

FINAL

Sungai Penuh, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR



PURNOMO

NIP 198507122005011002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (418935) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,431,033,926	1,830,696,804	600,337,122	32.79
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,774,171,156)	(1,679,460,241)	(2,094,710,915)	124.73
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,661,344,751	2,279,797,363	4,381,547,388	192.19
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,887,173,595	600,337,122	2,286,836,473	380.93
EKUITAS AKHIR	5,318,207,521	2,431,033,926	2,887,173,595	118.76

Keterangan :
FINAL

Sungai Penuh, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KERALA KANTOR



PUJUNOMO
NIP.198507122005011002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN IMIGRASI 06
SATUAN KERJA : KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI 418935

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	10,062,360,000	9,912,289,801	(150,070,199)	98.51	5,990,734,000	5,912,665,113	(78,068,887)	98.7
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Sungai Penuh, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA KANTOR



PURNOMO
NIP 198507122005011002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (418935) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	513,421,282	804,550,221	(291,128,939)	(36.19)
JUMLAH ASET LANCAR	513,421,282	804,550,221	(291,128,939)	(36.19)
ASET TETAP				
Tanah	50,000,000	50,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	8,943,835,428	5,329,998,258	3,613,837,170	67.80
Gedung dan Bangunan	859,681,300	859,681,300	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	30,609,009	0	30,609,009	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,960,339,498)	(4,610,745,853)	(349,593,645)	7.58
JUMLAH ASET TETAP	4,923,786,239	1,628,933,705	3,294,852,534	202.27
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	22,456,945	22,456,945	0	0.00
Aset Lain-lain	426,726,830	0	426,726,830	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(449,183,775)	(22,456,945)	(426,726,830)	1,900.20
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	5,437,207,521	2,433,483,926	3,003,723,595	123.43
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Pendapatan Diterima Dimuka	119,000,000	2,450,000	116,550,000	4,757.14
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	119,000,000	2,450,000	116,550,000	4,757.14
JUMLAH KEWAJIBAN	119,000,000	2,450,000	116,550,000	4,757.14
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,318,207,521	2,431,033,926	2,887,173,595	118.76
JUMLAH EKUITAS	5,318,207,521	2,431,033,926	2,887,173,595	118.76
JUMLAH EKUITAS	5,318,207,521	2,431,033,926	2,887,173,595	118.76
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,437,207,521	2,433,483,926	3,003,723,595	123.43

Keterangan :

FINAL

Sungai Penuh, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR



PURNOMO

NIP 198507122005011002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
 SATUAN KERJA : (418935) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	513,421,282	0
0.0	131111	Tanah	50,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,943,835,428	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	859,681,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	30,609,009	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,839,984,116
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	120,355,382
0.0	162151	Software	22,456,945	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	426,726,830	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	426,726,830
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	22,456,945
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	119,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,912,289,801
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,436,769,900	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,185,824,850
0.0	391111	Ekuitas	0	2,431,033,926
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	4,884,600,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	78,750,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	354,600,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,269,900
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,550,036,440	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	24,842	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	122,300,380	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	42,912,368	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	59,490,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	96,580,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,364,111	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	104,212,380	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	166,909,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	24,280,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	65,439,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	593,458,818	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,220,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	146,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37,464,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	76,646,900	0
3.0	521211	Beban Bahan	204,760,600	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (418935) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	50,086,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,087,822,709	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,500,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	53,618,165	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,216,667	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	9,450,800	0
3.0	522141	Beban Sewa	175,257,600	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	7,500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73,660,851	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181,489,590	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,107,893,471	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,350,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60,010,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,500,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	682,541,620	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17,193,626	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	47,159,729	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,350,992,889	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,702,500	0
JUMLAH			25,377,891,750	25,377,891,750

Keterangan :

FINAL

Sungai Penuh, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR



PUKUNOMO

NIP. 198507122005011002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI

SATUAN KERJA : (418935) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	9,912,289,801
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,436,769,900	0
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	5,001,150,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	78,750,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	354,600,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,269,900
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,550,036,440	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,847	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	122,300,380	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	42,912,368	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	59,980,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	96,580,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,364,111	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	104,212,380	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	166,909,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24,280,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	65,439,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	593,458,818	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,220,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	146,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	37,464,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	76,646,900	0
3.0	521211	Belanja Bahan	204,760,600	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	50,086,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,087,822,709	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	196,775,900	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	53,618,165	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,216,667	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	9,450,800	0
3.0	522141	Belanja Sewa	175,257,600	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	7,500,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104,269,860	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,213,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181,489,590	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,537,200	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,107,893,471	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (418935) KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 7:51 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,350,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60,010,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,500,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,667,854,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,005
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	490,000
JUMLAH			15,349,550,706	15,349,550,706

Keterangan :

FINAL

Sungai Penuh, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR



BURNOMO

198807122005011002



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 418935
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,062,360,000	10,062,360,000	0
2	Belanja	9,912,780,806	9,912,780,806	0
3	Pengembalian Belanja	-491,005	-491,005	0
4	Estimasi Pendapatan	2,347,400,000	2,347,400,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,436,769,900	5,436,769,900	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 31-JAN-25

